

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.177, 2012

AGREEMENT. Pengesahan. Kebebasan Hak Angkut. Subkawasan ASEAN.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL 3 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN THE ASEAN SUB-REGION* (PROTOKOL 3 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTAR SUBKAWASAN ASEAN) DAN *PROTOCOL 4 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN THE ASEAN SUB-REGION* (PROTOKOL 4 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS ANTAR SUBKAWASAN ASEAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Manila, Filipina, pada tanggal 20 Mei 2009 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol 3 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights between the ASEAN Sub-Region* (Protokol 3 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antar Subkawasan ASEAN) dan *Protocol 4 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights between the ASEAN Sub-Region* (Protokol 4 tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antar Subkawasan ASEAN), sebagai hasil perundingan Delegasi Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dalam Sidang Tingkat Menteri Transportasi ASEAN ke-14;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Protokol-protokol tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pengesahan *ASEAN Multilateral Agreement on Air Services* (Persetujuan Multilateral ASEAN tentang Jasa Angkutan Udara) beserta *Protocol 1 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights Within the ASEAN Sub-Region* (Protokol 1 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas dalam Subkawasan ASEAN) dan *Protocol 2 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights Within the ASEAN Sub-Region* (Protokol 2 tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas dalam Subkawasan ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL 3 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN THE ASEAN SUB-REGION* (PROTOKOL 3 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTAR SUBKAWASAN ASEAN) DAN *PROTOCOL 4 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN THE ASEAN SUB-REGION* (PROTOKOL 4 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS ANTAR SUBKAWASAN ASEAN).

Pasal 1

Mengesahkan *Protocol 3 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights between the ASEAN Sub-Region* (Protokol 3 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antar Subkawasan ASEAN) dan *Protocol 4 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights between the ASEAN Sub-Region* (Protokol 4 tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antar Subkawasan ASEAN), yang telah ditandatangani di Manila, Filipina, pada tanggal 20 Mei 2009 yang naskah

aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protokol-protokol dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

PROTOKOL 3
TENTANG PROTOKOL 3 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT
KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTAR SUB-
KAWASAN ASEAN

Pemerintah–pemerintah dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos (selanjutnya disebut Lao PDR), Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak" atau secara sendiri-sendiri disebut " Pihak");

MENGINGAT Persetujuan Multilateral ASEAN tentang Jasa Angkutan Udara yang ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2009 di Manila, Filipina (selanjutnya disebut "Persetujuan");

MENGAKUI bahwa Lampiran II Persetujuan tersebut memfasilitasi diselesaikannya Protokol-protokol Pelaksanaan yang wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan dimaksud;

MENGAKUI juga ayat 3 Pasal I dari Persetujuan Kerangka Kerja tentang Peningkatan Kerja Sama Ekonomi ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura, bahwa, dalam pelaksanaan pengaturan ekonomi, dua atau lebih Negara-negara Anggota dapat melaksanakan terlebih dahulu apabila Negara Anggota lain belum siap melaksanakan pengaturan ini; dan

BERKEINGINAN untuk menghilangkan hambatan jasa angkutan udara dengan maksud untuk mencapai liberalisasi penuh di ASEAN pada tahun 2015,

TELAH MENYEPAKATI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1 – Definisi

Untuk maksud Protokol ini, istilah "Sub-Kawasan ASEAN" berarti:

- a) Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina – Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur (*Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines-East ASEAN Growth Area /BIMP-EAGA*);
- b) Kerja Sama Angkutan Udara Sub-Kawasan antar-Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (*Sub-regional Cooperation in Air Transport among Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam /CLMV*);
- c) Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Singapura (*The Indonesia, Malaysia, Singapore-Growth Triangle /IMS-GT*);
- d) Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand (*The Indonesia, Malaysia, Thailand-Growth Triangle /IMT-GT*); atau
- e) Perluasan darinya atau subkawasan lain yang baru, jika ada.

Pasal 2 – Rute dan Hak Angkut

Perusahaan angkutan udara yang ditunjuk dari masing-masing Pihak wajib diperbolehkan untuk melaksanakan jasa angkutan udara penumpang dari setiap titik yang telah ditunjuk di wilayahnya ke setiap titik lain yang telah ditunjuk, selain di Sub-Kawasan ASEAN yang dimiliki Para Pihak dan sebaliknya dengan kebebasan penuh hak angkut ketiga (ke-3) dan keempat (ke-4).

Pasal 3 – Kapasitas dan Frekuensi

Wajib tidak ada pembatasan terhadap kapasitas, frekuensi, dan jenis pesawat udara yang berkaitan dengan jasa angkutan udara penumpang yang dilaksanakan berdasarkan Protokol ini sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2.

Pasal 4 – Spesifikasi Titik-Titik

Titik-titik yang ditunjuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

BIMP-EAGA	:	
- Brunei Darussalam		Bandar Seri Begawan
- Indonesia		Balikpapan dan Manado,
- Malaysia		Labuan dan Miri
- Filipina		Davao, General Santos, Puerto Princesa, dan Zamboanga;
CLMV	:	
- Kamboja		Phnom Penh
- Laos		Vientiane, Luang Phabang dan Pakse
- Myanmar		Yangon dan Mandalay

- Vietnam Hanoi, Danang, Dien Bien Phu, Phu Bai, Cat Bi, dan Lien Khuong

IMS-GT :
 - Indonesia Tidak ada komitmen
 - Malaysia Tidak ada komitmen
 - Singapura Tidak ada komitmen

IMT-GT :
 Indonesia Medan dan Padang
 Malaysia Alor Star dan Ipoh
 Thailand Hat Yai, Narathiwat, Pattani, Trang, dan Nakhon Si Thammarat

Pasal 5 – Ketentuan Akhir

1. Protokol ini wajib disimpan di Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menyampaikan salinan naskah tersebut kepada masing-masing Pihak.

2. Protokol ini tunduk pada ratifikasi atau penerimaan oleh Para Pihak yang telah meratifikasi atau menerima Persetujuan tersebut. Piagam Ratifikasi atau Penerimaan wajib disimpan di Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera memberitahukan kepada masing-masing Pihak mengenai penyimpanan tersebut.

3. Protokol ini wajib berlaku pada tanggal penyimpanan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan ketiga (ke-3) dari sedikitnya dua (2) Subkawasan ASEAN yang berbeda di Sekretaris Jenderal ASEAN dan wajib hanya berlaku antar-Para Pihak yang telah meratifikasi atau menerimanya. Bagi setiap Pihak yang meratifikasi atau menerima Protokol tersebut setelah penyimpanan Piagam Ratifikasi atau

Penerimaan ketiga (ke-3), Protokol dimaksud wajib berlaku pada tanggal penyimpanan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan dari Pihak tersebut.

4. Setiap perubahan terhadap ketentuan–ketentuan Protokol ini, kecuali dimasukkannya tambahan titik-titik yang ditunjuk, wajib berlaku dengan persetujuan dari Para Pihak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Persetujuan tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa untuk menandatangani oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Protokol 3 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antar Sub-Kawasan ASEAN.

DIBUAT di Manila, Filipina, pada tanggal 20 bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan, dalam satu naskah asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

Ttd

PEHIN DATO ABU BAKAR APONG
Menteri Komunikasi

Untuk Kerajaan Kamboja :

Ttd

MAO HAVANNALL

Sekretaris Negara

Sekretariat Negara Penerbangan Sipil

Untuk Republik Indonesia:

Ttd

JUSMAN SYAFII DJAMAL

Menteri Perhubungan

Untuk Republik Demokratik Rakyat Laos:

Ttd

SOMMAD PHOLSENA

Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi

Untuk Malaysia:

Ttd

DATO' SRI ONG TEE KEAT

Menteri Transportasi

Untuk Uni Myanmar:

Ttd

MAJOR GENERAL THEIN SWE

Menteri Transportasi

Untuk Republik Filipina:

Ttd

LEANDRO R. MENDOZA

Sekretaris Transportasi dan Komunikasi

Untuk Republik Singapore:

Ttd

RAYMOND LIM

Menteri Transportasi

Untuk Kerajaan Thailand:

Ttd

SOPHON ZARAM

Menteri Transportasi

Untuk Republik Sosialis Vietnam:

Ttd

HO NGHIA DZUNG

Menteri Transportasi



**PROTOCOL 3
ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC
RIGHTS BETWEEN THE ASEAN SUB-REGIONS**

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic (hereinafter referred to as "Lao PDR"), Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (hereinafter referred to collectively as "Contracting Parties" or individually as "Contracting Party"),

RECALLING the ASEAN Multilateral Agreement on Air Services signed on 20 May 2009 in Manila, Philippines (hereinafter referred to as "the Agreement");

RECOGNISING that Annex II of the Agreement thereof provides for the conclusion of Implementing Protocols which shall form integral parts of the Agreement;

RECOGNISING also paragraph 3 of Article I of the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation signed on 28 January 1992 in Singapore, that, in the implementation of economic arrangements, two or more Member States may proceed first if other Member States are not ready to implement these arrangements; and

DESIRING to remove restrictions on air services with a view of achieving full liberalisation in ASEAN by 2015,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:**Article 1 – Definitions**

For the purposes of this Protocol, the term "ASEAN Sub-region" means:

- a) The Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines-East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA);
- b) The Sub-regional Cooperation in Air Transport among Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam (CLMV);
- c) The Indonesia, Malaysia, Singapore-Growth Triangle (IMS-GT);
- d) The Indonesia, Malaysia, Thailand-Growth Triangle (IMT-GT); or
- e) Expansion there-from or any other new sub-regions as the case may be.

Article 2 – Routing and Traffic Rights

The designated airline(s) of each Contracting Party shall be allowed to operate air passenger services from any designated point(s) in its territory to any designated point(s) in the territory of the other Contracting Parties other than those of the ASEAN Sub-region to which that Contracting Party belongs and vice versa with full third (3rd) and fourth (4th) freedom traffic rights.

Article 3 – Capacity and Frequency

There shall be no limitation on capacity, frequency and aircraft type with regard to air passenger services operated under this Protocol as provided in Article 2.

Article 4 – Specification of Points

The designated points as mentioned in Article 2 are listed below:

BIMP-EAGA :

- | | |
|---------------------|--|
| - Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan |
| - Indonesia | Balikpapan and Manado |
| - Malaysia | Labuan and Miri |
| - The Philippines | Davao, General Santos, Puerto Princesa and Zamboanga; |

CLMV :

- | | |
|------------|--|
| - Cambodia | Phnom Penh |
| - Lao PDR | Vientiane, Luang Phabang and Pakse |
| - Myanmar | Yangon and Mandalay |
| - Viet Nam | Ha Noi, Da Nang, Dien Bien Phu, Phu Bai, Cat Bi and Lien Khuong |

IMS-GT :

- | | |
|-------------|----------------|
| - Indonesia | Not Applicable |
| - Malaysia | Not Applicable |
| - Singapore | Not Applicable |

IMT-GT

:

- Indonesia
- Malaysia
- Thailand

**Medan and Padang
Alor Star and Ipoh
Hat Yai, Narathiwat, Pattani,
Trang and Nakhon Si Thammarat**

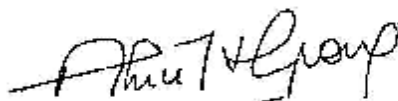
Article 5 – Final Provisions

1. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Contracting Party.
2. This Protocol is subject to ratification or acceptance by the Contracting Parties who have ratified or accepted the Agreement. The Instruments of Ratification or Acceptance shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly inform each Contracting Party of such deposit.
3. This Protocol shall enter into force on the date of the deposit of the third (3rd) Instrument of Ratification or Acceptance from at least two (2) different ASEAN Sub-regions with the Secretary-General of ASEAN and shall become effective only among the Contracting Parties that have ratified or accepted it. For each Contracting Party ratifying or accepting the Protocol after the deposit of the third (3rd) Instrument of Ratification or Acceptance, the Protocol shall enter into force on date of the deposit of such Contracting Party of its Instrument of Ratification or Acceptance.
4. Any amendment to the provisions of this Protocol, except the inclusion of additional designated points, shall be effected by consent of all the Contracting Parties, as provided for under Article 16 of the Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised to sign by their respective Governments, have signed Protocol 3 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights between the ASEAN Sub-Regions.

DONE at **Manila, Philippines**, this 20th day of May.....
in the Year **Two Thousand and Nine**...., in a single original copy in the English language.

For Brunei Darussalam:



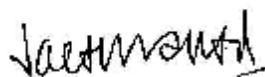
PEHIN DATO ABU BAKAR APONG
Minister of Communications

For the Kingdom of Cambodia:



MAO HAVANNALL
Secretary of State
State Secretariat of Civil Aviation

For the Republic of Indonesia:



JUSMAN SYAFII DJAMAL
Minister for Transportation

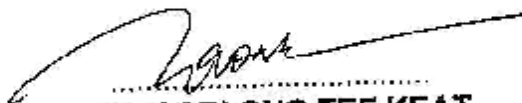
For the Lao People's Democratic Republic:



SOMMAD PHOLSENA

Minister of Public Works and Transport

For Malaysia:



DATO' SRI ONG TEE KEAT

Minister of Transport

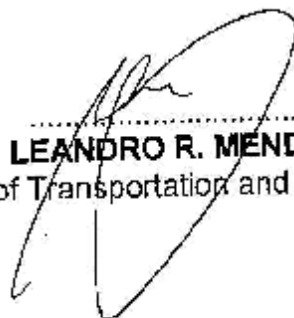
For the Union of Myanmar:



MAJOR GENERAL THEIN SWE

Minister for Transport

For the Republic of the Philippines:



LEANDRO R. MENDOZA

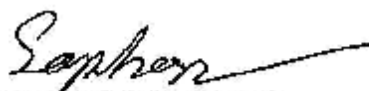
Secretary of Transportation and Communications

For the Republic of Singapore:



RAYMOND LIM
Minister for Transport

For the Kingdom of Thailand:



SOPHON ZARAM
Minister of Transport

For the Socialist Republic of Viet Nam:



HO NGHIA DZUNG
Minister of Transport

PROTOKOL 4
TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK
TERBATAS ANTAR SUB-KAWASAN ASEAN

Pemerintah—pemerintah dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos (selanjutnya disebut Lao PDR), Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak" atau secara sendiri-sendiri disebut " Pihak"),

MENGINGAT Persetujuan Multilateral ASEAN tentang Jasa Angkutan Udara yang ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2009 di Manila, Filipina (selanjutnya disebut "Persetujuan");

MENGAKUI bahwa Lampiran II Persetujuan tersebut memfasilitasi diselesaikannya Protokol-protokol Pelaksanaan yang wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan dimaksud;

MENGAKUI juga ayat 3 Pasal I dari Persetujuan Kerangka Kerja tentang Peningkatan Kerja Sama Ekonomi ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura, bahwa, dalam pelaksanaan pengaturan ekonomi, dua atau lebih Negara-negara Anggota dapat melaksanakan terlebih dahulu apabila Negara Anggota lain belum siap melaksanakan pengaturan ini; dan

BERKEINGINAN untuk menghilangkan hambatan jasa angkutan udara dengan maksud untuk mencapai liberalisasi penuh di ASEAN pada tahun 2015,

TELAH MENYEPAKATI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1 – Definisi

Untuk maksud Protokol ini :

1. Istilah "Sub-Kawasan ASEAN" berarti :

- a) Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina – Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur (*Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines-East ASEAN Growth Area /BIMP-EAGA*);
- b) Kerja Sama Angkutan Udara Subkawasan antar-Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (*Sub-Regional Cooperation in Air Transport among Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam /CLMV*);
- c) Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Singapura (*The Indonesia, Malaysia, Singapore-Growth Triangle /IMS-GT*);
- d) Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand (*The Indonesia, Malaysia, Thailand-Growth Triangle /IMT-GT*); atau
- e) Perluasan darinya atau sub-kawasan lain yang baru, jika ada.

2. Istilah "kebebasan hak angkut kelima (ke-5)" berarti kebebasan hak angkut kelima (ke-5) baik *intermediate* maupun *beyond* yang akan dilaksanakan secara keseluruhan di dalam ASEAN.

Pasal 2 – Rute dan Hak Angkut

Perusahaan angkutan udara yang ditunjuk dari masing-masing Pihak wajib, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari penunjukannya, diperbolehkan untuk melaksanakan jasa angkutan udara penumpang dari setiap titik yang telah ditunjuk di wilayahnya ke setiap titik yang telah ditunjuk Pihak lainnya melalui titik antara (*intermediate*) yang ditunjuk ke titik yang ditunjuk dalam wilayah Pihak lainnya ke titik setelah (*beyond*) yang ditunjuk dalam segala kombinasi atau urutannya dengan ketentuan bahwa titik – titik tersebut berada di dalam sub-kawasan ASEAN (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4) dan sebaliknya dengan kebebasan penuh hak angkut ketiga (ke-3), keempat (ke-4), dan kelima (ke-5).

Pasal 3 – Kapasitas dan Frekuensi

Wajib tidak ada pembatasan terhadap kapasitas, frekuensi, dan jenis pesawat udara yang berkaitan dengan jasa angkutan udara penumpang yang dilaksanakan berdasarkan Protokol ini sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2.

Pasal 4 – Spesifikasi Titik-titik

Titik-titik yang ditunjuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

BIMP-EAGA :

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| - Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan |
| - Indonesia | Balikpapan dan Manado |
| - Malaysia | Labuan dan Miri |
| - Filipina | Davao dan Zamboanga |

CLMV :

- | | |
|-----------|--|
| - Kamboja | Phnom Penh |
| - Laos | Vientiane, Luang Phabang dan Pakse |
| - Myanmar | Yangon dan Mandalay |
| - Vietnam | Hanoi, Danang, Dien Bien Phu, Phu Bai,
Cat Bi dan Lien Khuong |

IMS-GT :

- | | |
|-------------|--------------------|
| - Indonesia | Tidak ada komitmen |
| - Malaysia | Tidak ada komitmen |
| - Singapura | Tidak ada komitmen |

IMT-GT :

- | | |
|-------------|---|
| - Indonesia | Medan, dan Padang |
| - Malaysia | Ipoh dan Alor Star |
| - Thailand | Hat Yai, Narathiwat, Pattani, Trang dan
Nakon Si Thammarat |

Pasal 5 – Ketentuan Akhir

1. Protokol ini wajib disimpan di Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menyampaikan salinan naskah tersebut kepada masing-masing Pihak.
2. Protokol ini tunduk pada ratifikasi atau penerimaan oleh para Pihak yang telah meratifikasi atau menerima Persetujuan tersebut. Piagam Ratifikasi atau Penerimaan wajib disimpan di Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera memberitahukan kepada masing-masing Pihak mengenai penyimpanan tersebut.
3. Protokol ini wajib berlaku pada tanggal penyimpanan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan ketiga (ke-3) dari sedikitnya dua (2) Sub-kawasan ASEAN yang berbeda kepada Sekretaris Jenderal ASEAN dan wajib hanya berlaku antara Para Pihak yang telah meratifikasi atau menerimanya. Bagi masing-masing Pihak yang meratifikasi atau menerima Protokol tersebut setelah penyimpanan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan ketiga (ke-3), Protokol dimaksud wajib berlaku pada tanggal penyimpanan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan dari Pihak tersebut.
4. Setiap perubahan terhadap ketentuan-ketentuan Protokol ini, kecuali dimasukkannya tambahan titik-titik yang ditunjuk, wajib berlaku dengan persetujuan dari Para Pihak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 dari Persetujuan tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa untuk menandatangani oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Protokol 4 tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima Yang Tidak Terbatas Antar Sub-Kawasan ASEAN.

DIBUAT di Manila, Filipina, pada tanggal 20 bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan, dalam satu naskah asli dalam bahasa Inggris

Untuk Brunei Darussalam:

Ttd

PEHIN DATO ABU BAKAR APONG

Menteri Komunikasi

Untuk Kerajaan Kamboja :

Ttd

MAO HAVANNALL

Sekretaris Negara

Sekretariat Negara Penerbangan Sipil

Untuk Republik Indonesia:

Ttd

JUSMAN SYAFII DJAMAL

Menteri Transportasi

Untuk Republik Demokratik Rakyat Laos:

Ttd

SOMMAD PHOLSENA

Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi

Untuk Malaysia:

Ttd

DATO' SRI ONG TEE KEAT

Menteri Transportasi

Untuk Uni Myanmar:

Ttd

MAJOR GENERAL THEIN SWE

Menteri Transportasi

Untuk Republik Filipina:

Ttd

LEANDRO R. MENDOZA

Sekretaris Transportasi dan Komunikasi

Untuk Republik Singapore:

Ttd

RAYMOND LIM

Menteri Transportasi

Untuk Kerajaan Thailand:

Ttd

SOPHON ZARAM

Menteri Transportasi

Untuk Republik Sosialis Viet Nam:

Ttd

HO NGHIA DZUNG

Menteri Transportasi



**PROTOCOL 4
ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS
BETWEEN THE ASEAN SUB-REGIONS**

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic (hereinafter referred to as "Lao PDR"), Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (hereinafter referred to collectively as "Contracting Parties" or individually as "Contracting Party"),

RECALLING the ASEAN Multilateral Agreement on Air Services signed on 20 May 2009 in Manila, Philippines (hereinafter referred to as "the Agreement");

RECOGNISING that Annex II of the Agreement thereof provides for the conclusion of Implementing Protocols which shall form integral parts of the Agreement;

RECOGNISING also paragraph 3 of Article I of the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation signed on 28 January 1992 in Singapore, that, in the implementation of economic arrangements, two or more Member States may proceed first if other Member States are not ready to implement these arrangements; and

DESIRING to remove restrictions on air services with a view of achieving full liberalisation in ASEAN by 2015,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:**Article 1 – Definitions**

For the purposes of this Protocol:

1. The term "ASEAN Sub-region" means:
 - a) The Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines-East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA);
 - b) The Sub-regional Cooperation in Air Transport among Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam (CLMV);
 - c) The Indonesia, Malaysia, Singapore-Growth Triangle (IMS-GT);
 - d) The Indonesia, Malaysia, Thailand-Growth Triangle (IMT-GT); or
 - e) Expansion there-from or any other new sub-regions as the case may be.
2. The term "fifth (5th) freedom traffic rights" means intermediate and beyond fifth (5th) freedom traffic rights which are to be operated wholly within ASEAN.

Article 2 – Routing and Traffic Rights

The designated airline(s) of each Contracting Party shall, in accordance with the terms of its designation, be allowed to operate air passenger services from any designated point(s) in its territory to any designated point(s) in the territory of the other Contracting Parties via any designated intermediate point(s) to

any designated point(s) in the territory of any other Contracting Party to any designated beyond point(s) in any combination or order provided that the points are in ASEAN Sub-regions (as provided in Article 4) and vice versa with full third (3rd), fourth (4th) and fifth (5th) freedom traffic rights.

Article 3 – Capacity and Frequency

There shall be no limitation on capacity, frequency and aircraft type with regard to air passenger services operated under this Protocol as provided in Article 2.

Article 4 – Specification of Points

The designated points as mentioned in Article 2 are listed below:

BIMP-EAGA

- Brunei Darussalam
- Indonesia
- Malaysia
- The Philippines

**Bandar Seri Begawan
Balikpapan and Manado
Labuan and Miri
Davao and Zamboanga**

CLMV

- Cambodia
- Lao PDR
- Myanmar
- Viet Nam

**Phnom Penh
Vientiane, Luang Phabang and
Pakse
Yangon and Mandalay
Ha Noi, Da Nang, Dien Bien
Phu, Phu Bai, Cat Bi and Lien
Khuong**

IMS-GT

- Indonesia
- Malaysia
- Singapore

Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable

IMT-GT

- Indonesia
- Malaysia
- Thailand

**Medan and Padang
Ipoh and Alor Star
Hat Yai, Narathiwat, Pattani,
Trang and Nakhon Si Thammarat**

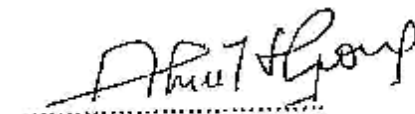
Article 5 – Final Provisions

1. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Contracting Party.
2. This Protocol is subject to ratification or acceptance by the Contracting Parties who have ratified or accepted the Agreement. The Instruments of Ratification or Acceptance shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly inform each Contracting Party of such deposit.
3. This Protocol shall enter into force on the date of the deposit of the third (3rd) Instrument of Ratification or Acceptance from at least two (2) different ASEAN Sub-regions with the Secretary-General of ASEAN and shall become effective only among the Contracting Parties that have ratified or accepted it. For each Contracting Party ratifying or accepting the Protocol after the deposit of the third (3rd) Instrument of Ratification or Acceptance, the Protocol shall enter into force on the date of the deposit of such Contracting Party of its Instrument of Ratification or Acceptance.
4. Any amendment to the provisions of this Protocol, except the inclusion of additional designated points, shall be effected by consent of all the Contracting Parties, as provided for under Article 16 of the Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised to sign by their respective Governments, have signed Protocol 4 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights between the ASEAN Sub-Regions.

DONE at **Manila, Philippines**, this 20th day of May.....
in the Year **Two Thousand and Nine**....., in a single original copy
in the English language.

For Brunei Darussalam:



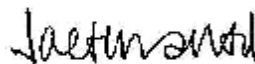
PEHIN DATO ABU BAKAR APONG
Minister of Communications

For the Kingdom of Cambodia:



MAO HAVANNALL
Secretary of State
State Secretariat of Civil Aviation

For the Republic of Indonesia:



JUSMAN SYAFII DJAMAL
Minister for Transportation

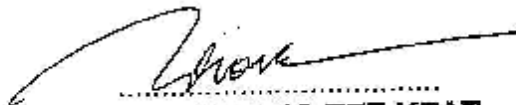
For the Lao People's Democratic Republic:



SOMMAD PHOLSENA

Minister of Public Works and Transport

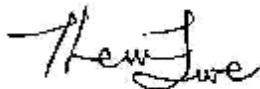
For Malaysia:



DATO' SRI ONG TEE KEAT

Minister of Transport

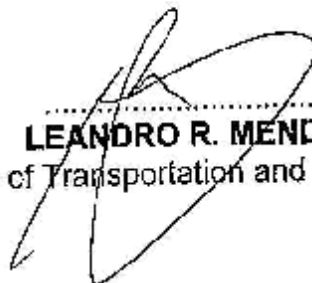
For the Union of Myanmar:



MAJOR GENERAL THEIN SWE

Minister for Transport

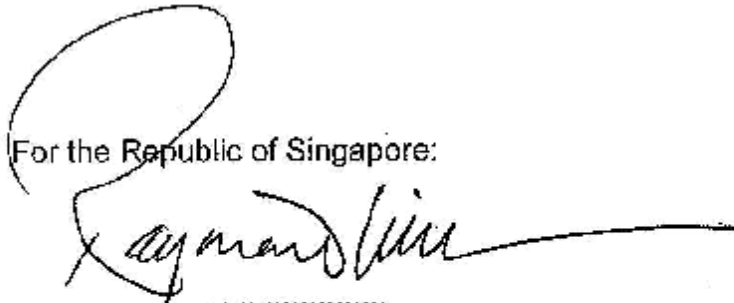
For the Republic of the Philippines:



LEANDRO R. MENDOZA

Secretary of Transportation and Communications

For the Republic of Singapore:



RAYMOND LIM
Minister for Transport

For the Kingdom of Thailand:



SOPHON ZARAM
Minister of Transport

For the Socialist Republic of Viet Nam:



HO NGHIA DZUNG
Minister of Transport